

BAB IV

SIKAP GEREJA KATOLIK MENGHADAPI MASALAH-MASALAH SOSIAL DI TIMOR LESTE DALAM TERANG OCTOGESIMA ADVENIENS, ARTIKEL 2

4.1. Latar Belakang

Pada dasarnya Ajaran Sosial Gereja (ASG) mulai lahir dari kepedulian, keprihatinan dan kesadaran akan setiap peristiwa hidup manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Meskipun ASG telah terungkap sejak Perjanjian Lama memuncak dalam peristiwa penebusan manusia oleh Tuhan Yesus Kristus, ajaran ini semakin tampak sejak Paus Leo XIII mengeluarkan ensiklik yang berjudul *Rerum Novarum*. Semenjak terbit Ensiklik ini para Bapa Suci melanjutkan seruan tentang ASG dari waktu ke waktu. Ajaran tersebut seluruh umat manusia diajak untuk semakin memiliki hati seperti Kristus dalam membangun masyarakat kehidupan sosial yang adil, sejahtera dan berpengharapan. ASG mengajak pribadi untuk melihat, merasakan, tergerak dan terlibat menanggapi keprihatinan situasi sosial dan situasi zaman demi kesejahteraan umum dan penghargaan atas martabat manusia sebagai pribadi dan makhluk sosial. “Gereja memandang sebagai kewajibannya membantu semua orang mengkaji masalah yang berat itu dalam segala dimensinya, dan pada saat sejarah yang gawat ini meyakinkan mereka akan perlunya kegiatan yang terpadu”.¹

Pada tahun 1891, Paus Leo XIII menerbitkan ensiklik *Rerum Novarum* yang dengan tegas menentang kondisi-kondisi yang tidak manusiawi. Konteks sejarah Ensiklik RN adalah masalah ekonomi yang menimpa para buruh dalam masyarakat industri. Ada tiga faktor yang menjadi kata kunci antara lain: buruh, modal dan negara. Paus Leo XIII sendiri dengan jelas menyatakan apa yang sewajarnya diharapkan dari Gereja: “Sudah jelas Gerejalah yang dari

¹PP, Art. 1.

ajaran Injil menimba kekuatan yang memadai untuk mengakhiri konflik atau setidaknya meredakan rasa pahitnya. Gereja jugalah yang berusaha melalui pedoman-pedomannya bukan melulu memberi penyuluhan kepada akalbudi, melainkan membimbing perihidup dan kesusilaan siapa pun juga. Gereja mengelola organisasi-organisasi sangat efisien untuk mendukung terwujudnya kondisi-kondisi yang lebih baik bagi mereka yang serba tak empunya”.² Paus Leo XIII sendiri, begitu juga para pengganti beliau, selalu menampilkan cintakasih kebapaan dan ketabahan pastoral, terutama untuk membela kaum miskin dan lemah. Tiada hentinya sekian banyak Bapa Suci berulang kali menyiarkan dan mendesakkan secara lisan maupun tertulis ajaran tentang soal sosial, politik, budaya dan ekonomi, yang disajikan oleh Ensiklik-Ensiklik, dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan semasa maupun situasi masyarakat. Banyak pula Uskup yang menjalankan itu juga. Penafsiran ajaran itu secara berkelanjutan dan kompeten diberikan oleh Takhta Apostolik untuk menerapkannya pada kondisi-kondisi serta lembaga-lembaga di pelbagai daerah. Oleh karena itu tidak mengherankan, bahwa banyak cendekiawan imam maupun awam merasa khas terdorong oleh keinginan, agar ajaran Gereja yang tidak berubah dan tak dapat berubah secara lebih efektif memenuhi tuntutan-tuntutan dan kebutuhan-kebutuhan baru. Dengan penuh semangat mereka berusaha mengembangkannya dengan Gereja sebagai pemandu dan guru mereka dalam ilmu pengetahuan sosial dan ekonomi dalam menanggapi situasi zaman sekarang.³

Dalam kurun waktu yang cukup lama ($\pm$ 80 tahun) ada sekian banyak Ensiklik dan Surat Apostolik yang terus mengikuti perkembangan sejarah umat manusia terutama masalah-masalah yang dihadapinya. Paus Paulus VI, pada tahun 1971 menulis Surat Apostolik *Octogesima Adveniens* kepada jemaat-jemaat Kristen untuk menganalisa secara obyektif situasi negaranya sendiri, menyinari dengan terang Injil yang tak pernah berubah

²QA, Art. 1.

³Bdk., *Ibid*, Art. 18-19.

dan mengambil bahan pemikiran, norma-norma pertimbangan serta pedoman-pedoman tindakan konkrit dari Ajaran Sosial Gereja. Ajaran sosial itu telah dikembangkan dalam perkembangan sejarah dan lebih-lebih dalam zaman industri ini sejak keluarnya Ensiklik Paus Leo XIII tentang keadaan kaum buruh.⁴ Surat Apostolik *Octogesima Adveniens* merupakan suatu Ajaran Sosial Gereja yang juga merupakan tanggapan terhadap fenomena atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia dalam bentuk himbaun, kritik atau dukungan. Dan Gereja terdorong oleh jeritan-jeritan atau masalah-masalah sosial, meminta semua dan setiap orang supaya mendengarkan permintaan saudara-saudari dan menanggapi penuh kasih.⁵

Di banyak tempat dan juga di negara RDTL mereka yang merupakan kaum minoritas yang lemah dan susah, perlu di dengar suaranya. Pada bangsa-bangsa lain termasuk Timor Leste, yang mengakui posisi Gereja secara resmi, Gereja pun ikut menanggung dampak-pengaruh krisis yang menggoncangkan masyarakat. Ada di antara para anggotanya yang tergoda untuk menempuh cara-cara yang radikal dan memakai kekerasan untuk memecahkan soal-soal, dan dari usaha-usaha itu mereka merasa dapat mengharapkan hasil yang lebih baik. Sedangkan ada yang karena tidak menyadari pelanggaran-pelanggaran keadilan yang sedang berlangsung berusaha melestarikan situasi sekarang ini. Ada juga pihak-pihak yang telah dikelabui oleh ideologi-ideologi revolusioner, yang menjanjikan bagi mereka dunia yang "lebih baik" walaupun dalam kenyataannya sering mengecewakan.⁶ Paus Paulus VI melalui *Octogesima Adveniens* mengoreksi pendapat kaum marxis bahwa semua permasalahan dalam kehidupan manusia (kaum buruh) hanyalah sebatas masalah ekonomi. Ia memberi perhatian penuh secara keseluruhan bahwa bukan hanya masalah-masalah sosial yang mempunyai akar dalam situasi ekonomis, melainkan supaya dirubah struktur yang menghalangi

⁴OA, Art. 4.

⁵Bdk., PP, Art. 3.

⁶OA, Art. 3

perkembangan. Paulus VI paham betul tentang situasi hidup umat yang sangat berbeda-beda, dan karena itu ia tidak berani memberikan suatu ajaran umum yang berlaku untuk semua. *Octogesima Adveniens* menyebut sejumlah masalah sosial yang baru tanpa memberi jawaban atau tanggapan yang jelas. Inti pokok dari OA adalah melihat semua masalah sosial secara keseluruhan dan tidak hanya terpaku pada masalah ekonomis karena setiap masalah yang dialami umat berbeda-beda.

Persoalan sosial yang diungkap dalam Surat Apostolik *Octogesima Adveniens* tersebut merupakan bagian dari persoalan-persoalan yang ada pada umat/masyarakat Timor Leste. Dapat dimengerti bahwa situasi umat yakni masalah-masalah sosial di Timor Leste harus dikritisi, dianalisa tidak hanya sebatas persoalan ekonomis melainkan secara keseluruhan yakni, sosial, politik, budaya dan ekonomi. Mulai tahun 1515 hingga dewasa ini usia Gereja Katolik di Timor Leste sekitar 500 tahun dan Gereja telah mengalami dan ikut ambil bagian dari pada masalah-masalah sosial yang mempengaruhi kehidupan umatnya. Peradaban umat dan perkembangan serta kemajuan dunia senantiasa mendapat tantangan yang signifikan. Nuansa batin serta nurani Gereja Katolik Timor Leste tidak mungkin terdiam dan membiarkan umatnya hidup dalam tekanan dan perlakuan yang tidak manusiawi.

Oleh karena itu, berdasarkan OA dibawah pimpinan kuasa mengajar Gereja terus menyuarakan kepedulian dan keprihatinannya atas masalah-masalah sosial. Masalah sosial adalah masalah utama umat Timor Leste. Masalah sosial perlu perhatian penuh karena sifatnya yang kompleks dan perlu dilihat dan dianalisa secara menyeluruh. Perlulah menempatkan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perekonomian modern dalam hubungannya yang lebih luas dengan kebudayaan baru”.⁷ Gereja Katolik Timor Leste sedang ditantang untuk menunjukkan identitasnya ditengah keprihatinan terhadap situasi umatnya yang diwarnai kemerosotan diberbagai aspek kehidupan yakni dibidang sosial, ekonomi,

⁷ *Ibid.*, Art. 7.

budaya dan politik. Tetapi perlu dilihat juga aspek lain dimana penampilan Gereja di Timor Leste lebih bercorak penampilan ibadat daripada penampilan gerakan sosial. Warga Gereja Katolik yang hidup kecukupan tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang benar-benar menderita.

4.2. Octogesima Adveniensi, Artikel 2

“Masalah-masalah itu tentu ada yang khas bagi masing-masing wilayah dunia, tetapi sekaligus juga dihadapi bersama oleh segenap umat manusia, yang sedang bertanya-tanya tentang masa depannya dan tentang arus-arus serta makna perubahan-perubahan yang tengah berlangsung. Dalam perkembangan ekonomi, budaya dan politik bangsa-bangsa terdapat perbedaan-perbedaan yang menyolok: sementara ada daerah-daerah yang padat industri, daerah-daerah lain masih berada di tahap pertanian; sedangkan negeri-negeri tertentu menikmati kesejahteraan, negeri-negeri lain baru berjuang untuk mengatasi kelaparan; sedangkan bangsa-bangsa tertentu sudah tinggi tataran kebudayaannya, bangsa-bangsa lain masih berusaha mengatasi keadaan buta huruf. Di mana-mana didambakan keadaan yang lebih adil dan timbul hasrat akan damai yang lebih terjamin karena sikap saling menghormati antara orang-orang maupun bangsa-bangsa.”⁸

4.3. Pokok Pikiran Penting Dalam Artikel 2

“Masalah-masalah itu tentu ada yang khas bagi masing-masing wilayah dunia, tetapi sekaligus juga dihadapi bersama oleh segenap umat manusia, yang sedang bertanya-tanya tentang masa depannya dan tentang arus-arus serta makna perubahan-perubahan yang tengah berlangsung. Dalam perkembangan ekonomi, budaya dan politik bangsa-bangsa terdapat perbedaan-perbedaan yang menyolok.”⁹

4.3.1. Perkembangan ekonomi yang menyebabkan ketidakadilan atau ketidakadilan ekonomi

Setiap individu tidak boleh menggunakan kebebasannya untuk berkembang secara ekonomis dengan mengabaikan kepentingan umum (masyarakat). Hal tersebut agar terhindar dari konflik kepentingan. Di sini perlu aturan bersama untuk menjamin kepentingan individu tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat. Menurut Louis Kelso dan Mortimer Alder, di dalam konsep keadilan ekonomi terdapat tiga prinsip esensial yaitu partisipasi, distribusi dan harmoni.¹⁰ Yang dimaksud adalah perlakuan yang adil bagi setiap orang untuk mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada. Dalam *Katekismus*

⁸OA, Art. 2.

⁹*Ibid.*

¹⁰Novrizaljuanda, *Prinsip Keadilan Ekonomi*, dalam <https://steit.com> diakses pada 12 Maret 2018, pukul 21:45.

Gereja Katolik dikatakan bahwa “Kesamaan di antara manusia berhubungan secara hakiki dengan martabatnya sebagai pribadi dan dengan hak-hak yang timbul darinya.”¹¹

4.3.2. Perkembangan budaya yang menyebabkan adanya ketidakadilan

Dalam masyarakat tertentu terdapat budaya khas yang dapat menimbulkan adanya ketidakadilan. Munculnya ketidakadilan karena tidak ada budaya *kejujuran*. “Bibir yang benar dikenang raja dan orang yang berkata jujur dikasihi-Nya” (Amsal 16:13). Kejujuran ini pula dapat di masukkan dalam Sepuluh Perintah Allah yang ketujuh, *jangan mencuri*. Dengan demikian, kejujuran adalah sikap moral yang sejati, yang berasal dari hati yang bersih dan diterjemahkan dalam tutur kata dan perbuatan. Dengan demikian, kejujuran harus dijadikan sebuah budaya dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari praktek hidup yang menyebabkan adanya ketidakadilan.

4.3.3. Adanya ketidakadilan karena perkembangan politik

Dewasa ini, semua orang berkeinginan untuk berkuasa dan menjadi kaya. Persaingan politik adalah sebuah kesempatan untuk meraih kekuasaan dan kekayaan. Untuk mendapatkan kekuasaan tersebut seringkali sesama dikorbankan dengan tidak adil. Begitupun untuk menjadi kaya sebagian orang dikorbankan dan berlaku tidak adil terhadap sesamanya. Menurut Mgr. Ignatius Suharyo, ada beberapa hal yang harus dipegang teguh: hormat terhadap martabat manusia, martabat manusia harus dihargai sepenuhnya dan tak boleh diperalat untuk tujuan apapun, termasuk tujuan politik.¹²

Bertitik tolak dari perkembangan ekonomi, budaya dan politik; keadilan dan perdamaian menjadi harapan umat atau masyarakat dalam hidup bernegara dan berbangsa. “Dimana-mana didambakan keadaan yang lebih adil dan timbul hasrat akan damai yang lebih

¹¹Paus Yohanes Paulus II (Promulgator), *Katekismus Gereja Katolik*, Terjemahan Bahasa Indonesia P. Herman Embuiru, SVD, (Ende: Propinsi Gerejani Ende, 1995), no. 1935, selanjutnya akan disingkat KGK dan nomornya.

¹²Mgr. Ignatius Suharyo, *Etika Politik Katolik* dalam [www.perdamaianimankatolik.com>tag>keadilan](http://www.perdamaianimankatolik.com/tag/keadilan) diakses pada 12 Maret 2018, pukul 23:09. Italic dari penulis.

terjamin karena sikap saling menghormati antara orang-orang maupun bangsa-bangsa.”¹³ Melalui ajaran sosialnya Gereja menunjukkan keprihatinannya bagi kehidupan manusia di tengah masyarakat, karena menyadari bahwa mutu kehidupan sosial – yakni relasi keadilan dan cinta kasih yang membentuk tenunan serta perdamaian dalam relasi antarpribadi dan antarkelompok orang. Berikut uraian dari keadilan dan perdamaian:

➤ Keadilan

Keadilan adalah sebuah nilai yang menyertai pelaksanaan kebijakan moral pokok yang sepadan. Seturut rumusannya yang klasik, keadilan itu adalah kehendak yang tetap dan teguh untuk memberikan kepada Allah dan sesama apa yang menjadi hak mereka.¹⁴ Magisterium Gereja secara tetap menyerukan agar dihormati bentuk-bentuk keadilan yang paling klasik: keadilan komutatif, distributif dan legal.¹⁵ Menurut Aristoteles, keadilan komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Sedangkan keadilan distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (sebuah prestasi).¹⁶ Keadilan legal (*Iustitia Legalis*) adalah keadilan menurut undang-undang ataupun peraturan atas kebaikan bersama.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Menurut pendapat yang lebih umum dikatakan bahwa keadilan itu adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Atau dengan kata lain keadaan dimana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Socrates, memproyeksikan keadilan pada pemerintahan. Sedangkan dari prespektif Kong Hu

¹³OA, Art. 2.

¹⁴Komisi Kepausan Untuk Keadilan dan Perdamaian, *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*, (Mauere: Ledalero, 2009), hlm. 139.

¹⁵*Ibid.*, Bdk. KGK, no. 2411.

¹⁶Asrur Rifa, *Teori Keadilan Menurut Aristoteles Beserta Contohnya*, dalam www.siswamaster.com diakses pada 13 Maret 2018, pukul 20:09.

Chu, keadilan terjadi apabila anak sebagai anak, ayah sebagai ayah, dan raja sebagai raja, masing-masing melaksanakan kewajibannya.

➤ Perdamaian

Dalam Ajaran Sosial Gereja dikatakan bahwa “Perdamaian perlu didasarkan atas suatu aturan yang ditegakkan di atas kebenaran, dibangun sesuai dengan keadilan, dihidupkan dan diintegrasikan oleh cinta kasih dan dilaksanakan dalam praktek kebebasan”.¹⁷ Sedangkan Gereja mengajarkan bahwa perdamaian sejati hanya dimungkinkan melalui pengampunan dan rekonsiliasi”.¹⁸ Istilah biblis untuk damai adalah *shalom*.¹⁹ Kata *shalom* memiliki pengertian yang luas dan komprehensif. *Shalom* tidak hanya meliputi situasi dimana tidak ada kekerasan atau perang, tetapi juga mencakup kesehatan jasmani, kesejahteraan (material), kepuasan, ketenangan dan hidup yang seimbang di dalam masyarakat.

Dalam Ensiklik *Pacem in Terris* oleh Paus Yohanes XXIII dapat ditemukan bahwa perdamaian bukan persoalan ada atau tidak adanya perang tetapi yang sangat dikenal saat ini adalah persoalan keadilan. Apabila di kalangan masyarakat sosial ada masalah kemiskinan dan juga ketidakadilan yang tidak teratasi maka mustahil masyarakat hidup dalam damai. Paus Yohanes XXIII menekankan bahwa atas dasar kodrat yang tertulis dalam hati manusia, manusia harus dapat mengembangkan tatanan moral untuk menuntun kehidupannya menuju perdamaian. Dalam isi Ensiklik ini pula menunjukkan sebuah perdamaian dalam empat segmen yakni ketertiban antara manusia, hubungan antara individu dan negara, hubungan antarnegara dan komunitas dunia.

¹⁷Michael J. Schultheis, *Op. Cit.*, hlm. 58.

¹⁸Komisi Kepausan Untuk Keadilan dan Perdamaian, *Op Cit.*, hlm. 352. Bdk. Paus Yohanes Paulus XXIII, *Pacem in Terris*, dalam R. Hardawiryana (Penerj.), (Jakarta: Obor, 1993), Art.167. Selanjutnya akan disingkat PT menyusul nomor artikelnya.

¹⁹D. Hismoko Mahamboro, PR, *Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan*, dalam Inspirasi, Vol. XIII, no. 148, Desember 2016, (Yogyakarta: Santo Paulus Kentungan), dengan hlm. 22.

4.4. Masalah Sosial Yang Ada Didalam Octogesima Adveniensi, Artikel 2

4.4.1. Pengertian Masalah Sosial

Masalah sosial merupakan hambatan-hambatan dalam usaha untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, yang dapat terwujud sebagai masalah sosial, moral, politik, agama, dan lain-lain.²⁰ Dalam perkembangan suatu negara, hal yang menggelisahkan adalah masalah sosial. Perubahan pesat di berbagai bidang selalu menimbulkan persoalan-persoalan sosial (masalah sosial). Menurut Blumer, masalah sosial pada dasarnya adalah produk dari definisi kolektif.²¹ Atau suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai dan karenanya perlu untuk diatasi atau diperbaiki.²² Namun masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh sekelompok masyarakat tidaklah sama dengan masyarakat lainnya karena adanya perbedaan tingkat perkembangan kebudayaan dan masyarakatnya.

Yang membedakan masalah-masalah sosial dari masalah-masalah lainnya adalah bahwa masalah-masalah sosial selalu ada kaitannya yang dekat dengan nilai-nilai moral dan pranata-pranata sosial, serta ada kaitannya dengan hubungan-hubungan manusia dan dengan konteks-konteks normatif dimana hubungan-hubungan manusia itu terwujud.²³ Karakteristik dari masalah sosial antara lain: dirasakan oleh banyak orang, kondisi tidak menyenangkan dan faktor yang memicu timbulnya masalah sosial adalah akibat dari perubahan sosial dan akibat dari pembangunan sosial. Dampak negatif dari masalah sosial tersebut adalah timbulnya

²⁰Dr. Ir. Sri Rahaju Djatimurti Rita Hanafie, M.P., *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Yogyakarta: Andi, 2016), hlm. 7. Bdk. Drs. H. Abu Ahmadi, dkk, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm. 12.

²¹Wayne Parsons, *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy analysis*, dalam Tri Wibowo Budi Santoso, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 104.

²²Drs. Lies Sudibyo, MH, dan Drs. Agus Sudargono, MSi, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Yogyakarta: Andi, 2013), hlm. 3.

²³Drs. H. Abu Ahmadi, dkk, *Loc. Cit.*

kesenjangan sosial, timbulnya perpecahan antar masyarakat, adanya rasa ketidakadilan dan lain-lain.²⁴

4.4.2. Masalah Sosial dalam Octogesima Adveniensi, Artikel 2

Untuk selanjutnya, mari kita lihat secara saksama masalah-masalah sosial dalam *Octogesima Adveniensi*, artikel 2. Masalah sosial dalam OA, artikel 2 ini tentu memiliki arti yang sangat luas namun peneliti berusaha untuk memfokuskan (mempersempit) masalah sosial yang ada, menghubungkan dan memasukkan ke dalam realitas sosial negara baru (Timor Leste). Berikut kutipan dari *Octogesima Adveniensi*, artikel 2:

“Masalah-masalah itu tentu ada yang khas bagi masing-masing wilayah dunia, tetapi sekaligus juga dihadapi bersama oleh *segenap umat manusia, yang sedang bertanya-tanya tentang masa depannya dan tentang arus-arus serta makna perubahan-perubahan yang tengah berlangsung. Dalam perkembangan ekonomi, budaya dan politik bangsa-bangsa terdapat perbedaan-perbedaan yang menyolok: sedangkan ada daerah-daerah yang padat industri, daerah-daerah lain masih berada di tahap pertanian; sedangkan negeri-negeri tertentu menikmati kesejahteraan, negeri-negeri lain baru berjuang untuk mengatasi kelaparan; sedangkan bangsa-bangsa tertentu sudah tinggi tataran kebudayaannya, bangsa-bangsa lain masih berusaha mengatasi keadaan buta huruf. Di mana-mana didambakan keadaan yang lebih adil dan timbul hasrat akan damai yang lebih terjamin karena sikap saling menghormati antara orang-orang mau pun bangsa-bangsa*”.²⁵

Sebagai negara yang baru, Timor Leste tentu mempunyai masalah-masalah sosial yang amat kompleks. Tetapi, berdasar pada Surat Apostolik *Octogesima Adveniensi*, artikel 2 ini, peneliti mencermati persoalan sosial Timor Leste dan permasalahannya. Masalah-masalah itu tentu ada yang khas²⁶ yang memang sangat mempengaruhi rakyat/umat di dalam kehidupan sehari-hari. Bertitik tolak dari OA, artikel 2 ini, pertanyaannya adalah apa penyebab sehingga segenap umat manusia, sedang bertanya-tanya tentang masa depannya dan tentang arus-arus serta makna perubahan-perubahan yang tengah berlangsung?²⁷

²⁴Bdk. Aha Blogweb Sosiologi, *Masalah Sosial: Pengertian, Penyebab, Bentuk, Dampak* dalam www.ilmudasar.com diakses pada 9 Maret 2018, pukul 17:47.

²⁵OA, Art. 2. *Italic* dari Penulis.

²⁶OA, Art. 2.

²⁷OA, Art. 2.

Negara dan Gereja Katolik Timor Leste sedang berhadapan dengan pertanyaan ini. Tentu ada faktor penyebabnya. Dalam terang OA, artikel 2 tersebut, faktor penyebabnya adalah masalah ekonomi, politik dan budaya. Timor Leste sebagai negara yang baru berkembang tentu berbeda jauh dari negara-negara yang sudah berkembang. Nah, persoalannya adalah bagaimana negara berusaha dan kesetiakawanan atau bentuk solidaritas dari Gereja Katolik bisa membawa rakyat/umat pada kesejahteraan atau memenuhi prinsip Ajaran Sosial Gereja. Dengan ini, ada beberapa masalah sosial yang terdapat dalam perkembangan ekonomi, budaya dan politik²⁸ antara lain:

4.4.2.1. Masalah Sosial Ekonomi

Dalam perkembangan ekonomi Timor Leste, sebagai negara yang baru berkembang salah satu masalah sosial yang paling terkenal adalah kemiskinan. Rakyat masih berada pada tahap pertanian tanpa campur tangan pemerintah dalam pengelolaan; masih berjuang untuk mengatasi kelaparan atau bersikap pasif, acuh tak acuh atau tidak bergairah untuk bekerja atau sikap malas; masih berusaha mengatasi keadaan buta huruf,²⁹ atau pendidikan yang rendah; terbatasnya lapangan kerja, beban keluarga,³⁰ dan juga pola pikir masyarakat yang tidak berubah.³¹

Di sini dapat dimengerti bahwa Timor Leste adalah negara yang kurang maju karena di sebagian besar *Less Developed Country* (LDC): negara yang kurang maju, beberapa faktor seperti kemiskinan, buta huruf, konflik etnis, intervensi negara asing, dan perbedaan kelas, berpadu untuk menciptakan instabilitas politik, represi pemerintah.³² Apa yang menjadi pertimbangan? Ada fenomena ketertinggalan ekonomi dan sosial yang dijadikan sebagai

²⁸OA, Art. 2.

²⁹Bdk. OA, Art. 2.

³⁰Itang, *Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Tazkiya*, [S.I.] v. 16, n. 01, ISSN 1411-7886, dalam <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/206>, diakses pada 22 Februari 2018, pukul 12:32.

³¹Tasya Hanna Putri Sasmita, *Faktor Penyebab Kemiskinan di Indonesia* dalam <https://www.kompasiana.com>, diakses pada 22 Februari 2018, pukul 12:47.

³²Marcus E. Ethridge dan Howard Handelman, *Politics in a Changing World: A Comparative Introduction to Political Science*, Fourth Edition, dalam Lita Yusron (penerj.), *Politik Dalam Dunia Yang Berubah*, (Bandung: Nusa Media, 2016), hlm. 658.

pertimbangan yang mengindikasikan pada pendapatan per kapita (tidak adanya kemajuan ekonomi) dalam pembangunan sosial.³³ Di Timor Leste pendapatan nasional tiap tahun tidak memadai meskipun jumlah penduduknya sedikit, maka tingkat kemajuan ekonomi negara tersebut lemah. Misalnya, pembagian atau distribusi pendapatan nasional hanya menumpuk pada sebagian orang, persentase penduduk yang masih hidup dibawah garis kemiskinan, tidak mudah memperoleh kebutuhan hidup (sandang, pangan dan papan), tidak mudah memperoleh lapangan kerja.³⁴

4.4.2.2. Masalah Sosial Budaya

Perkembangan suatu negara tentu dapat mempengaruhi perkembangan sosial budaya. Ada dampak positif dan juga negatifnya. Sistem sosial budaya masyarakat Timor Leste, mengalami banyak perubahan yang mengakibatkan masalah-masalah sosial baru. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, disebut "Ortega sebagai "drama" karena drama bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang sedang berlangsung".³⁵ Perubahan dalam sosial budaya tersebut membuka kemungkinan-kemungkinan baru tetapi juga mengandung banyak resiko.³⁶ Di antaranya adalah peralihan dari hal yang lama ke hal yang baru yang dialami dalam ranah sosial budaya³⁷ yang berdampak negatif (terjadinya masalah sosial) akibat dari globalisasi. Timor Leste yang merdeka di abad 21 ini mengalami proses perkembangan yang serba modern yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pola hidup dan mentalitas masyarakat.

³³Bdk. *Ibid.*, hlm. 658-666.

³⁴Bdk. Maila Niamas, *Pendapatan Per Kapita*, [Pengertian, Rumus dan Contoh], dalam situs Akuntansi Lengkap dan Terpopuler, www.akuntansilengkap.com, diakses pada 22 Februari 2018, pukul 13:49.

³⁵Alois A. Nugroho, *Manusia dan Perubahan Sejarah: Berfilsafat Bersama José Ortega Y Gasset*, dalam M. Sastrapratedja, *Manusia Multi Dimensional, Sebuah Renungan Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1983), 101-120, hlm. 113.

³⁶J. B. Banawiratma, SJ dan J. Müller, SJ., *Berteologi Sosial Lintas Ilmu, Kemiskinan sebagai Tantangan Hidup Beriman*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), hlm. 178.

³⁷Anneahira, *Apakah Definisi Sosial Budaya?* Dalam www.anneahira.com diakses pada 26 Februari 2018, pukul 18:45.

Permasalahan sosial budaya memiliki arti yang cukup luas. Oleh karena itu, atas landasan kondisi sosial masyarakat Timor Leste, ada beberapa masalah sosial budaya yang khas, antara lain:

- Adanya kemiskinan dan pengangguran: masalah pengangguran saat ini masih menjadi ancaman bagi pemerintah. Pertumbuhan ekonomi di Negara Timor Leste masih belum berdampak pada peningkatan jumlah lapangan tenaga kerja. Program pemerintah pada sektor pariwisata dan industri pun belum memadai. Begitupun sumber daya manusia yang tertinggal, baik dalam pendidikan formal, pendidikan vokasi, maupun dalam peningkatan ketrampilan. Sebagian masyarakat juga miskin karena sering menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan ketiadaan infrastruktur serta pelayanan publik yang belum memadai.
- Kenakalan remaja merupakan kegagalan dalam menjalani proses perkembangan jiwanya, baik pada saat remaja maupun saat anak-anak. Hal ini disebabkan karena didikan orang tua yang lemah. Menurut Sunarwiyati, kenakalan remaja menjadi tiga tingkatan, pertama, kenakalan biasa seperti suka berkelahi, bolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit; kedua, kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil/motor tanpa SIM, mengambil barang orang tanpa izin; ketiga, kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks diluar nikah, pergaulan bebas, pemerkosaan, dll. Kenakalan remaja terjadi karena krisis identitas dan kontrol diri yang lemah
- Kerusakan lingkungan hidup terjadi karena lemahnya tingkat pendidikan dan lemah kesadaran dalam mengelola lingkungan. Terjadi kerusakan lingkungan disebabkan juga oleh sikap membuang sampah sembarangan.
- Kriminalitas juga seringkali terjadi di Timor Leste disebabkan oleh faktor budaya. Perbedaan budaya, ras atau suku, dijadikan sebagai sumber perselisihan untuk menonjolkan

kehebatan. Terjadinya kriminalitas di antara kaum remaja juga karena grup-grup pencak silat dan sifat mengandalkan pencak silatnya sebagai yang paling baik, sehingga terjadilah permusuhan dan konflik.

➤ Mutu pendidikan rendah: Rendahnya kualitas pendidikan juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di Timor Leste. Kemiskinan disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi terutama industri, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis. Contoh Konkret: Mega Proyek ZEEMS di Distrik Oecusse, yang mayoritas tenaga kerja dari negara tetangga Indonesia.

➤ Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah: Pada umumnya, di negara Timor Leste ada dua faktor yang menyebabkan masih rendahnya sumber daya manusia: pertama, faktor pendidikan yang masih relatif rendah yakni minat menyekolahkan anak masih rendah, sarana dan prasarana masih belum memadai dan proporsional terutama untuk SD, SMP dan SMA. Rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas guru dimana kualitas guru sangat memprihatinkan dimana banyak tamatan SMA yang mengajar. Kedua, faktor kesehatan dimana banyak penduduk Timor Leste mengalami kesehatan buruk sehingga berpengaruh terhadap tingkat produktivitas.

➤ Degradasi dalam keluarga: Timor Leste menghadapi banyak tantangan modern dan tantangan globalisasi yang memberi dampak terhadap keluarga, lunturnya/menurunnya nilai-nilai moral, nilai-nilai religius dan nilai-nilai budaya membawa dampak negatif bagi keluarga. Arus globalisasi tengah mempengaruhi nilai moral bahkan nilai religius dalam keluarga, etika sopan santun saat ini hampir tidak ada nilainya.

4.4.2.3. Masalah Sosial Politik

Sosial politik merupakan istilah yang dibangun dari dua kata "sosial" dan "politik". Secara disiplin ilmu, istilah tersebut sangat erat berhubungan dengan disiplin ilmu sosiologi dan politik. Oleh karena itu, sosial politik lebih dekat dengan kata sifat yang bermakna dan terkait dengan masalah atau konteks sosial dan politik. Hal sosial terkait dengan masyarakat, sedangkan hal politik terkait dengan kekuasaan atau pemerintahan.³⁸ Di sini materi kajian masalah sosial politik berhubungan dengan masalah yang terkait dengan soal kemasyarakatan dan hal yang terkait dengan kenegaraan atau pemerintahan. Hubungan ini memiliki makna bahwa negara harus mampu mengatur demi kepentingan keadilan bagi semua rakyat dan bukan hanya demi sekelompok kecil pemimpin politik melalui demokrasi.³⁹ Atau bisa dikatakan bahwa fungsi negara adalah memajukan kesejahteraan rakyat, dan memungkinkan rakyatnya untuk berkembang dan hidup lebih baik serta mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Timor Leste yang sebagai negara demokratis, wajib mengatur agar warga negaranya dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu adanya keterlibatan warga negara dalam proses kehidupan politik.

Keadaan sosial politik di Timor Leste memiliki fokus terhadap bermacam-macam masalah yang berkaitan dengan soal politik, dan masyarakat banyak dikendalikan oleh soal politik. Masalah sosial politik aktual yang dihadapi masyarakat Timor Leste adalah:

1. *Regime Democrática (Regim Demokratik)*,⁴⁰
2. *Politik figur* yang memberi dampak negatif bagi masyarakat, seperti konflik diantara masyarakat: Pro Xanana vs Pro Mari Alkatiri,

³⁸Prof. Dr. H. Sapriya, M, Ed. dan Runik Mahfiroh, M. Pd. *Isu Sosial Politik dan Sosial Budaya dalam Pendidikan dasar*, dalam www.pustaka.ut.ac.id/MPDR5302-M1 diakses pada 12 Maret 2018, pukul 16:01.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Martinho G. da Silva Gusmão, "*Revolução da Ternura*": *Politika Batina Mutin. Papa Francisco Dehan: "Pecador, Sim! Traidor, Não"*, dalam www.forum-haksesuk.blogspot.com diakses pada 12 Maret 2018, pukul 16:36.

3. *Pensão vitalicia* (anuitas hidup bagi anggota DPR) sedangkan rakyat hidup dalam kemiskinan,
4. Minimnya praktek *demokrasi partisipatoris*⁴¹ (keterlibatan masyarakat dalam politik berkurang),
5. Kebijakan pemerintah dalam alokasi dana tidak proporsional (misalnya: ”untuk sektor pendidikan USD 2,419 juta, sektor pertanian USD 3,151 juta dan kesehatan USD 2,0 juta sedangkan untuk mega proyek seperti ZEEMS mencapai USD 172,110 juta dan mega proyek Tasi Mane USD 49,3 juta”⁴²),
6. Adanya praktek ideologi Marxisme yang menimbulkan totalitarianisme dan kekerasan, penindasan, tekanan psikologis,
7. Terjadinya ”konflik politik (konflik kelas, konflik etnis dan partisipasi politik),”⁴³
8. Adanya diskriminasi dalam kebijakan sosial dan ketidakadilan, dan
9. Masalah pendidikan.

4.5. Masalah Sosial Masyarakat Timor Leste Dalam Kaca Mata Octogesima Adveniensi

Ada berbagai macam masalah sosial yang dipaparkan oleh Paulus VI melalui *Octogesima Adveniensi*, kita dapat mengkritisi situasi sosial Timor Leste, seperti sebagai berikut:

- Ibu Kota Dili mengalami pertumbuhan penduduk dan urbanisasi sehingga banyak orang tidak dapat dipenuhi kebutuhan pokok mereka, sementara kebutuhan yang tidak utama diciptakan (bdk. Art. 9).
- Individualisme semakin mencolok dimana orang-orang sedang mengalami kesepian baru dalam suatu dunia yang asing (bdk. Art. 10).

⁴¹Bdk. Prof. Dr. H. Sapriya, M, Ed. dan Runik Mahfiroh, M. Pd., *Loc. Cit.*

⁴²Forum Haksasuk, *Amo Martinho Gusmão: Regiaun sira Kosta Sul Hanesan Suai, Same no Viqueque Mak Merese Hetan Osan Boot*, dalam www.forum-haksasuk.blogspot.co.id diakses pada 12 Maret 2018, pukul 17:18.

⁴³Bdk. Marcus E. Ethridge dan Howard Handelman, *Op. Cit.*, hlm. 678-685.

- Mereka yang lemah menjadi korban kondisi hidup yang tidak manusiawi (bdk. Art. 11).
- Kaum muda semakin merasa sulit berdialog dengan kaum dewasa (bdk. Art. 13).
- Tidak ada kebijakan yang memungkinkan orang berhak atas pekerjaan dan upah yang adil (bdk. Art. 15).
- Perlindungan terhadap orang-orang cacat, jompo dan yang tersingkir masih kurang bahkan tidak ada (bdk. Art. 15).
- Diskriminasi ras, keturunan, kebudayaan, jenis kelamin dan agama masih ada dan tidak dapat dibenarkan (bdk. Art. 16).
- Adanya masalah lapangan kerja, pendidikan serta organisasi produksi dan perdagangan (bdk. Art. 18).
- Alat-alat komunikasi tidak memadai dan cenderung memiliki potensi negatif (bdk. Art. 20).
- Belum ada kesadaran akan perlindungan lingkungan (bdk. Art. 21).

Memang harus diakui bahwa negara Timor Leste yang baru merdeka belasan tahun memiliki masalah-masalah sosial yang kompleks. Menurut Paus Paulus VI masalah-masalah yang kompleks seperti ini tidak bisa diselesaikan secara ekonomis saja seperti pandangan marxis namun harus dipecahkan secara keseluruhan sebagai masalah manusia seutuhnya. Disini dibutuhkan solidaritas, keterlibatan sosial dan tanggungjawab dari Gereja Katolik Timor Leste.

4.6. Solidaritas Gereja Katolik Timor Leste

Solidaritas mengacu kepada baik kesatuan, maupun keteguhan demi suatu komitmen atau kepentingan bersama. Melihat problem sosial diatas sikap solidaritas Gereja Katolik Timor Leste sangat diperlukan. Usia yang cukup lama, keberadaan Gereja Katolik di Timor Leste sudah tidak asing lagi dalam memberi perhatian kepada umatnya terhadap persoalan umat. Salah satu tindakan nyatanya adalah dalam bentuk aksi solidaritas. Berdasarkan prinsip solidaritas yang diajarkan Gereja, Gereja Katolik Timor Leste terus menerus berusaha mengajak untuk membangun kesejahteraan umum. Paus Yohanes Paulus II melalui ensiklik *Sollicitudo Res Socialis* menyebut solidaritas sebagai keutamaan hakiki bagi kehidupan sosial. Paus menjelaskan apa yang dimaksud dengan solidaritas: “Solidaritas bukan perasaan belas kasihan yang tidak jelas atau kesedihan yang dangkal terhadap kemalangan begitu banyak orang ...sebaliknya, solidaritas adalah ketetapan hati yang mantap dan tekun untuk komitmen-kan diri kepada kesejahteraan umum, yaitu pada kebaikan semua orang dan individu...”.⁴⁴ Ia mengingatkan bahwa kita hidup bersama dengan sesama, dengan manusia, bukan dengan gerombolan yang bisa dikorbankan dan dimanfaatkan demi keuntungan sendiri.

Solidaritas telah menjadi wacana pokok berkait dengan keprihatinan dan kepedulian Gereja Katolik Timor Leste terhadap umatnya, yang ditandai oleh kenyataan paradoksal, yakni jurang kaya-miskin, persoalan perubahan iklim – gaya hidup yang tidak berubah. Kenyataan ini tentu saja menjadi tantangan bagi semua orang terutama Gereja Katolik Timor Leste yang berkehendak baik dan peduli pada kemanusiaan, dan keutuhan ciptaan. Gagasan dan sumber inspirasi bagi kepedulian terhadap umatnya beranjak dari prinsip solidaritas. “Karena kewajibannya menurut Injil, Gereja merasa terpanggil untuk memihak kaum miskin, untuk mengenali adilnya permintaan-permintaan mereka dan membantu memenuhinya, tanpa

⁴⁴SRS, Art. 38.

mengabaikan kepentingan kelompok-kelompok dalam rangka kesejahteraan umum”.⁴⁵ Mengutamakan umatnya yang miskin, marginal dan tertindas merupakan kewajiban moral bagi Gereja Katolik Timor Leste. Kesadaran moral ini mengajak semua orang untuk mengatur dan mengarahkan setiap umat agar membangun solidaritas dengan mereka yang marginal dan tertindas terutama yang miskin.

4.7. Keterlibatan Sosial Gereja Katolik Timor Leste

Sikap solidaritas Gereja Katolik di Timor Leste sejak tahun 1515 sampai dewasa ini terlibat secara langsung dan total dalam permasalahan sosial; permasalahan sosial umatnya adalah permasalahan sosial Gereja pula. Keterlibatan sosial Gereja Katolik Timor Leste bukan hanya menjadi refleksi atas situasi pastoral Gereja lokal, tetapi juga sebagai refleksi keprihatinan Gereja atas permasalahan sosial yang sedang dihadapi umatnya. Keterlibatan sosial Gereja Katolik Timor Leste tidak hanyaewartakan Injil, tetapi juga mengamalkan dan berusaha mewujudkan nilai-nilai Injili menjadi realitas hidup dan perilaku Gereja. Gereja hadir menyertai umatnya, terlibat dan memberi teladan dalam usaha memperjuangkan kesejahteraan bersama dan keadilan sosial.

Gereja Katolik Timor Leste dalam urusan masalah-masalah sosial, Paus Yohanes XXIII melalui Ensiklik *Mater et Magistra* mengatakan bahwa Gereja pertama-tama harus mengusahakan keselamatan jiwa-jiwa, Gereja juga peduli pada hidup manusia sehari-hari. Ditegaskan tentang bagaimana Ajaran Sosial Gereja dapat memberikan cara-cara untuk mengatasi permasalahan hidup masa kini. Tugas utama Gereja Katolik Timor Leste ada dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku moral. Gereja tidak memiliki solusi teknis atas berbagai masalah sosial, kewenangan Gereja bukan di bidang ekonomi atau politik. Keprihatinan utama Gereja ada pada urusan kemanusiaan.

⁴⁵*Ibid.*, Art. 39.

Dalam perkembangan keterlibatan sosial Gereja Katolik Timor Leste senantiasa wajib menyelidiki tanda-tanda jaman dan menafsirkannya dalam cahaya Injil melalui cara yang sesuai dengan generasi tertentu dalam sejarah manusia. Menghadapi dimensi waktu yang selalu berubah, ada dua ciri khas keterlibatan sosial Gereja: bersifat tetap senantiasa sama saja dalam asas-asasnya yang paling mendasar, dalam prinsip-prinsip refleksi, norma-norma penilaian, pedoman untuk bertindak dan terutama dalam hubungannya dengan Injil; bersifat selalu baru, harus selalu tanggap dan disesuaikan dengan berbagai situasi jaman yang selalu dalam proses perubahan sesuai dinamika kehidupan sosial manusia.

4.8. Tanggungjawab Gereja Katolik Timor Leste Menurut Octogesima Adveniensi

Di tengah gangguan-gangguan dan tiadanya kepastian sekarang ini Gereja wajib menyiarkan amanat yang khas dan memberi dukungan kepada orang-orang dalam usaha menentukan dan mengarahkan masa depan mereka. Konsili Vatikan II pun cukup cermat menunjukkannya, khususnya dalam Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*. Kontitusi sendiri melanjutkan haluan berpikir itu dalam Ensiklik *Populorum Progressio*. Dikatakan bahwa Zaman sekarang ini kenyataan utama yang kita semua harus akui ialah bahwa masalah sosial meliputi seluruh dunia. "Suatu kesadaran yang diperbaharui akan tuntutan-tuntutan Injil mewajibkan Gereja untuk bersedia melayani semua orang, membantu mereka memahami masalah mereka yang gawat dalam segala dimensinya, serta menyakinkan mereka bahwa sungguh mendesaklah solidaritas dalam bertindak pada titik-balik sejarah manusia sekarang ini".⁴⁶ Gereja Katolik Timor Leste harus bertanggungjawab untuk membedakan dan bertindak dalam terang Injil dan pengajaran sosial gereja:

⁴⁶OA, Art. 5.

- Keanekaragaman situasi umat setempat, Gereja Katolik Timor Leste mengemban tanggungjawab untuk menilai dan bertindak dalam terang Injil dan pengajaran sosial gereja⁴⁷
- Tugas GKTL untuk melayani semua orang, membantu mereka memahami masalah-masalah serius dewasa ini, dan meyakinkan mereka bahwa kesetiakawanan dalam tindakan adalah mendesak⁴⁸

Dalam menghadapi masalah-masalah sosial umatnya, Gereja Katolik Timor Leste memiliki peranan penting untuk membantu masyarakat dan negara dalam pemecahan persoalan-persoalan agar tetap menjunjung tinggi martabat manusia sebagai Ciptaan Allah.

4.9. Panggilan Untuk Bertindak Dalam Octogesima Adveniens

Tugas jemaat-jemaat Kristiani menganalisis secara obyektif situasi yang khas bagi negeri mereka sendiri, menyinarinya dengan terang amanat Injil yang tidak dapat diubah, dan dari ajaran sosial Gereja menggali asas-asas untuk refleksi, norma-norma untuk penilaian serta pedoman-pedoman untuk bertindak.⁴⁹ Dalam *Octogesima Adveniens*, Paus Paulus VI mengajak para hierarki gereja dan umat untuk bertindak⁵⁰:

- Hierarki mengemban tugas untuk mengajar dan menafsirkan secara otentik norma moralitas, dan setiap umat awam mengemban tanggungjawab pribadi yang berdasarkan iman dan pengharapan, untuk meresapi tata dunia dengan semangat kristiani.
- Orang kristiani harus membuat suatu pilihan bijaksana sesuai imannya dan menghindari bahaya keakuan kelompok dan totalitarianisme yang menindas.
- Orang-orang kristiani mengemban tugas untuk memberi inspirasi dan membantu membenahi struktur agar menemukan kebutuhan nyata dewasa ini.

⁴⁷Lih. OA, Art. 3-4.

⁴⁸ Lih. OA, Art. 5.

⁴⁹ OA, Art. 4.

⁵⁰ Baca: OA, Art. 48-52.

- Organisasi kristen bertanggungjawab atas tindakan bersama demi perubahan masyarakat. Mereka adalah saksi karya Roh Kudus.
- Umat Allah agar sungguh memahami peranannya di zaman sekarang ini dan memajukan kerasulannya.

4.10. Analis Sosial-Tindakan Sosial dan Tugas Politis

Untuk pemecahan sebuah masalah dan atau semua masalah sosial, perlu adanya sebuah analisa sosial. Tetapi analisa sosial ini tidak dengan sendirinya memberi solusi atau paling tidak mengubah situasi melainkan perlu adanya sebuah tindakan sosial yang konkret. Didalam Surat Apostolik *Octogesima Adveniens*, ditekankan kewajiban untuk untuk mengemban tugas politis.

- Analisis sosial adalah “usaha memperoleh gambaran yang lengkap tentang sebuah situasi sosial dengan menggali hubungan historis dan strukturalnya”.⁵¹ Analisis sosial merupakan sebuah perangkat yang memberi pemahaman yang bisa kita tangkap dan paham tentang realitas. Analisis sosial juga bisa memungkinkan kita untuk menyelidiki, sejauh mana sebuah lembaga, yakni lembaga-lembaga terkait seperti sosial, kebudayaan, politik, ekonomi memberi sebuah kebijakan. Apakah kebijakan itu dapat memusatkan pada masalah kemiskinan: kelaparan, pengangguran, dan lain-lain, sehingga kebijakan tersebut benar-benar tertuju dan dapat mengubah sebuah situasi sosial.
- Tindakan sosial merupakan sebuah tindakan konkret. Kalau analisa sosial sebatas duduk dan berbicara tetapi tindakan konkret perlu keterlibatan langsung dan tindakan konkret-praxis. Karena dengan tindakan konkret inilah yang dapat menentukan untuk mengurangi suatu masalah. Tindakan konkret ini juga merupakan “perwujudan imperatif-imperatif Injil, terutama pilihan yang

⁵¹Joe Holland, Petter Henriot SJ., *Op. Cit.*, hal. 30.

mendahulukan orang miskin”.⁵² Injil sebagai sumber untuk setiap orang dalam melaksanakan sebuah tindakan atau membantu orang-orang yang mengalami penderitaan (kemiskinan). Semangat Iman harus “diterjemahkan” dan melalui suatu mediasi diantar ke dalam kenyataan hidup, agar inspirasi Injil mendapat wujud nyata dalam zaman dan situasi sekarang.⁵³

- Paus Paulus VI melalui *Octogesima Adveniens* (art. 43 dan 47), mengatakan bahwa hierarki, umat maupun aparat pemerintah harus memiliki kewajiban untuk mengemban tugas politis. Paus Paulus VI menekankan adanya prinsip subsidiaritas dan tugas wewenangan otorita politis. Namun keprihatinan dan tanggungjawab untuk kesejahteraan umum tidak boleh dilakukan saja oleh otorita politik tetapi merupakan tanggungjawab semua warga/umat atas kesejahteraan umum yang diwujudkan dalam keterlibatan politik dalam bentuk partisipasi dan ikut serta dalam kebijakan dan tindakan.

4.11. Catatan Kritis terhadap Gereja Katolik di Timor Leste

Dapat diketahui bahwa keberadaan Gereja Katolik sekian lama di Timor Leste membawa dampak baik itu positif maupun juga negatif. Dalam Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste dikatakan bahwa Gereja Katolik diakui oleh negara dalam memperjuangkan kemerdekaan. Gereja Katolik Timor Leste memiliki posisi istimewa dan telah negara mengakui itu. Posisi keistimewaan itu membuat Gereja seringkali menyimpang dari ajarannya sendiri. Fakta membuktikan bahwa pada awal-awal pembentukan pemerintahan Timor Leste, Gereja cenderung berkeinginan untuk menguasai bahkan cenderung ikut campur meskipun secara tidak langsung. Awal-awal itu Gereja sangat berpengaruh. Arah ketakutan yang diciptakan Gereja sebagai hierarki semakin terlihat bukan hanya terhadap umat biasa tetapi juga para petinggi negara. Kekuasaan politik itu

⁵²J. B. Banawiratma, SJ dan J. Müller, SJ., *Berteologi Sosial Lintas Ilmu, Kemiskinan sebagai Tantangan Hidup Beriman*, Op. Cit., hal. 226.

⁵³*Ibid.*

gereja tidak berlangsung lama namun dalam praktik hidup sehari-hari masih terlihat jelas dalam pelayanannya. Dalam praktek pelayanannya gereja mengambil kesempatan dari pemerintah untuk memperkaya dirinya sendiri. Ada banyak peristiwa yang menunjukkan hal tersebut. Gereja merasa cukup kuat untuk menghubungkan misi dengan berbagai kebijakan politik pemerintah, yang ujung-ujungnya kebijakan tersebut dapat menindas dan merugikan kaum yang lemah. Yang sangat menonjol adalah umat bahkan para frater dijadikan objek bisnis. Ini semua sungguh-sungguh terjadi.

Sebagai ucapan terima kasih Negara Republik Demokratik Timor Leste kepada Gereja Katolik, dana anggaran negara sebagian diberi kepada Gereja. Gereja ataupun kapela dibangun dimana-mana dengan bangunan yang megah, proposal dari biarawan-biarawati bertumpuk-tumpuk, kegiatan-kegiatan pastoral paroki selalu dependensi terhadap pemerintah. Gereja, dalam hal ini mayoritas paroki merupakan tempat untuk berbisnis. Keadilan dan kejujuran mulai dipersoalkan banyak orang. Bahkan banyak peristiwa yang sangat memalukan seperti perebutan posisi (haus kekuasaan) dalam sebuah institusi ataupun paroki. Karena dengan dapat posisi di atas bisa mendapat keuntungan dan bisa mendapat banyak uang dari pemerintah dan ONG. Ada banyak peluang untuk bisa berbisnis atau mengejar-kejar kekayaan. Di Seminari disaat tertentu para frater dijadikan objek bisnis. Mentalitas ini terbawa dalam proses formasi. Pembentukan karakter dan mentalitas dipengaruhi oleh pengalaman tersebut. Kemerosotan moral sungguh terjadi didalam institusi Gereja. Hal-hal semacam ini merupakan batu sandungan utama yang diperlihatkan dan dipraktekkan oleh orang-orang yang telah ditahbiskan. Kesimpulannya bahwa Gereja sekurang-kurangnya mengambil mamfaat dari adanya situasi dimana ketidakadilan dan ketidakjujuran masih terjadi dan dilakukan oleh elit tertentu.

Peluang untuk pelayanan sosial dijadikan bisnis, umat dijadikan sebagai objek bisnis. Keadilan dan kejujuran seorang biarawan/biarawati dalam pelayanan ini tidak ada lagi.

Persoalan atau masalah-masalah sosial yang ada menjadi kabur, tidak ada kajian-kajian atau analisis-analisis sosial dan refleksi teologis yang dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikannya. Berdasarkan pengalaman ini, Gereja harus kembali kepada identitasnya yang sebenarnya. Sekurang-kurangnya Gereja harus bersikap adil dan jujur.

Peran Gereja dalam memperjuangkan keadilan dalam masyarakat menuai kritikan. Pertama-tama karena Gereja dan orang kristen lebih cenderung memperjuangkan hak-haknya dari pada menyadari panggilannya untuk pendampingan dan pemberdayaan kaum lemah dalam masyarakat. Gereja selalu mengidentifikasi dirinya sebagai kaum lemah yang memerlukan bantuan. Sikap seperti itu pertama-tama tidak sesuai dengan hakekatnya sebagai persekutuan yang dipanggil, dikuduskan dan diutus ke dalam dunia untuk menampakkan tanda-tanda keadilan dan damai sejahtera Injil Kerajaan Allah. Selain itu, sikap itu tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat kita dewasa ini, yang makin sarat dengan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan. Peran kesaksian dan pelayanan Gereja justru memperoleh peluang dan ujian di tengah-tengah berbagai perkembangan bangsa kita dewasa ini.

4.11.1. Keadilan

Untuk memahami keadilan dalam perspektif iman Katolik penting mengenal dua sumber nilai keadilan yaitu Kitab Suci dan Ajaran Sosial Gereja. Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama keadilan berasal dari Allah dan dalam Injil keadilan dimeteraikan sendiri oleh Yesus Kristus sebagai Allah yang menjadi Manusia. Pokok ajaran Yesus tentang keadilan dinyatakan dalam hukum cinta kasih dengan mencintai sesama. Cinta kasih Yesus kepada manusia telah dibuktikan oleh Yesus sendiri sehingga setiap orang Katolik wajib untuk mengimplementasikan dalam kehidupan dengan orang lain.

Gereja harus memperlakukan semua pihak dengan sama, tidak melakukan diskriminasi atau semacamnya. Keadilan disini menuntut agar Gereja dapat mengambil

tindakan yang diperlukan untuk menjauhkan dirinya dari ketidakadilan, serta memiliki sikap, tekad, dan kemauan untuk berlaku adil. Gerejalah yang harus pertama-tama memperjuangkan keadilan. Berikut ini cara Gereja memperjuangkan keadilan dalam masyarakat:

➤ Jujur Tulus dan Benar Tanpa Memihak

Allah itu adil, dan gagasan keadilan-Nya harus diterapkan secara jujur, tulus, dan benar tanpa memihak. Gereja memusatkan perhatian pada upaya menegakkan keadilan ditengah masyarakat, dan melakukannya berlandaskan keadilan Allah yang memelihara, melindungi, serta menyelamatkan tanpa pandang bulu.

➤ Kepedulian dan Solidaritas Terhadap Sesama

Keadilan diterapkan oleh Gereja dalam solidaritas terhadap orang miskin, tertindas dan terbelakang. Di dalam hukum kasih, Tuhan Yesus dengan tegas menegakkan keadilan dengan menegakkan kepedulian terhadap sesama yang berkekurangan, sakit, tertindas, terpenjara, serta terasing (Mat. 25:31-46).

➤ Jalan Cinta Kasih

Usaha-usaha untuk memperjuangkan keadilan hendaknya dilandasi cinta kasih. Kabar gembira kerajaan Allah yang menjadi tujuan hidup orang kristen adalah amanat cinta kasih, yaitu penebusan manusia dalam Kristus. Apabila amanat cintakasih tidak memperlihatkan kedayagunaannya melalui tindakan keadilan maka ajaran cinta kasih yang Gereja bagikan itu sia-sia belaka, tak akan dipercaya.

➤ Kooperatif

Pola yang tepat untuk dilakukan Gereja dalam memperjuangkan keadilan adalah pola kooperatif. Dalam pola ini, Gereja bersama-sama

memperjuangkan keadilan dengan masyarakat yang membutuhkannya dengan melakukan langkah berikut:

- mempelajari dengan baik persoalan hak-hak manusia, sehingga dapat menentukan dengan benar mana yang perlu dilindungi atau ditegasi.
- memberdayakan korban ketidakadilan, sehingga mereka menyadari situasi yang dihadapi dan kemudian sama-sama berjuang.
- bertindak tepat, memberi kesaksian hidup dengan terlibat secara langsung, dan itu dimulai dari diri sendiri.

➤ **Membela Kepentingan Kaum Tertindas, Miskin, Lemah dan Tersingkir**

Dalam prinsip ajaran sosial gereja, yang didorong oleh panggilan profetisnya. Gereja harus turut serta memperjuangkan keadilan dalam masyarakat, dengan cara menceburkan diri dalam kancah realitas dan pergulatan hidup manusia. Gereja membela kepentingan kaum tertindas, miskin, lemah, dan tersingkir, terutama kaum yang tidak bersuara. Cinta dan keadilan tidak dapat dipisahkan, sebab keadilan mencapai kepenuhannya dalam cinta.

Dalam Ajaran Sosial Gereja, Gereja menganjurkan agar keadilan dihayati dan dijalankan oleh setiap orang katolik. Gereja sebagai organisasi yang hidup harus berjuang bersama umatnya dalam menegakkan nilai-nilai keadilan khususnya bagi mereka yang termarginalkan dan menjadi korban malpraktek ekonomi, politik dan kekuasaan oleh sekelompok orang. Hal itu dapat dicapai dengan menegakkan keadilan secara komutatif, distributif dan legal, yang pada intinya menjadi sendi-sendi keadilan sosial dalam hidup bermasyarakat. Bagi setiap manusia, keadilan harus terus diperjuangkan dan menjadi komitmen setiap individu, masyarakat dan negara untuk ditegakkan. Perjuangan untuk menegakkan keadilan tidak hanya menjadi tanggungjawab negara tetapi juga menjadi tanggungjawab setiap individu. Harapan kita bahwa keadilan dalam dimensi apapun

dapat diperoleh setiap individu, kelompok baik dalam ruang lingkup kecil maupun dalam ruang lingkup yang luas.

4.11.2. Kejujuran

Allah menghendaki agar manusia berusaha hidup dengan jujur, tulus dan benar mulai dalam hati dan pikirannya. Dan ini hanya mungkin terjadi kalau manusia berusaha menjaga kemurnian hati nurani, dengan menjauhkan diri dari segala kecemaran, niat dan pikiran jahat. Oleh karena itu, manusia harus menundukkan diri dibawah Kuasa Sabda Tuhan dan menjadikannya sebagai pedoman hidup.

Kejujuran adalah pilihan dari kehendak; pilihan untuk mencari Kebenaran, tidak peduli apa, bagaimana, dan dimana. Pilihan inilah yang merupakan hal yang paling menentukan, paling momentum yang dapat dilakukan. Pilihan ini merupakan tindakan berpihak kepada terang daripada kegelapan, memilih untuk menuju surga daripada neraka.

Gereja Katolik Timor Leste dalam setiap pelayanannya harus menjunjung tinggi kejujuran. Kejujuran sesungguhnya menuntut komitmen, sehingga dengan leluasa menghayati pelayanannya dan memberi kesaksian tentang arti kebenaran dan kejujuran. Maka pertama-tama kejujuran harus dirasakan dalam Gereja atau lain kata kejujuran harus ditanam terlebih dahulu di dalam institusi Gereja (hierarki).

4.12. Harapan Baru

Pada semua orang perlu didorong kemauan untuk melibatkan diri dalam usaha-usaha bersama. Memang layak dipujilah pola bertindak bangsa, bila sebanyak mungkin warga negaranya dalam kebebasan sejati melibatkan diri dalam urusan-urusan kenegaraan umum. Tetapi perlu diperhitungkan juga keadaan nyata setiap bangsa, begitu pula perlunya pemerintahan yang kuat. Adapun supaya semua warga negara bergairah untuk melibatkan diri dalam kehidupan pelbagai kelompok, yang seluruhnya membentuk tubuh masyarakat, perlulah bahwa dalam kelompok-kelompok itu mereka temukan nilai-nilai, yang menarik

mereka, dan membangkitkan kesediaan mereka untuk melayani sesama. Memang wajarlah pandangan kita, bahwa nasib bangsa manusia dikemudian hari terletak ditangan mereka yang mampu mewariskan kepada generasi-generasi mendatang dasar-dasar untuk hidup dan berharap.⁵⁴ Kita memang diperingatkan, bahwa bagi manusia tiada gunanya, kalau ia memperoleh seluruh dunia, tetapi membinasakan dirinya. Akan tetapi janganlah karena mendambakan dunia baru orang lalu menjadi lemah perhatiannya untuk mengolah dunia ini. Justru harus tumbuhlah perhatian itu, sehingga berkembanglah tubuh keluarga manusia yang baru, yang sudah mampu memberi suatu bayangan tentang zaman baru. Maka dari itu, sungguhpun kemajuan duniawi harus dengan cermat dibedakan dari pertumbuhan Kerajaan Kristus, tetapi kemajuan itu sangat penting bagi Kerajaan Allah, sejauh dapat membantu untuk mengatur masyarakat manusia secara lebih baik. Sebab nilai-nilai martabat manusia, persekutuan persaudaraan dan kebebasan, dengan kata lain: semua buah hasil yang baik, yang bersumber pada kodrat maupun usaha kita, sesudah kita sebarluaskan di dunia dalam Roh Tuhan dan menurut perintah-Nya.⁵⁵

Oleh karena itu, berdasarkan Injil yang dipercayakan kepada Gereja, Gereja mewartakan hak-hak manusia, dan mengakui serta menjunjung tinggi dinamisme zaman sekarang, yang dimana-mana mendukung hak-hak itu. Tetapi gerakan itu perlu dijiwai oleh semangat Injil dan dilindungi terhadap setiap bentuk otonomi palsu. Sebab kita dapat tergoda untuk beranggapan seolah-olah hak-hak pribadi kita hanya terjamin sepenuhnya bila kita dibebaskan dari setiap norma hukum ilahi. Tetapi dengan cara itu martabat pribadi manusia takkan diselamatkan, justru malahan akan runtuh.⁵⁶ Gereja hendak membantu dan memajukan semua lembaga sosial semacam itu, sejauh itu tergantung padanya dan dapat digabungkan dengan misinya. Yang paling diinginkan oleh Gereja yakni untuk mengabdikan kepada kesejahteraan semua orang, dan dapat mengembangkan diri dengan bebas di bawah

⁵⁴GS, Art.13.

⁵⁵*Ibid.*, Art. 39.

⁵⁶*Ibid.*, Art. 41.

pemerintahan manapun, yang mengakui hak-hak asasi pribadi dan keluarga serta kebutuhan-kebutuhan akan kesejahteraan umum.⁵⁷

Di negara Republik Demokratik Timor Leste, di dalam Gereja Katolik, Uskup yang dipercayai tugas untuk memimpin, bersama imam-imam hendaknya menyiarkan warta Kristus sedemikian rupa, sehingga semua kegiatan umat beriman di dunia dilimpahi cahaya Injil. Selain itu hendaklah semua gembala menyadari bahwa dengan perilaku serta kesibukan-kesibukan mereka sehari-hari mereka menampilkan kepada dunia citra Gereja tertentu, yang bagi khalayak ramai menjadi pedoman untuk menilai kekuatan dan kebenaran warta kristiani. Hendaknya, melalui perihidup maupun kata-kata mereka bersama kaum religius serta umat beriman mereka, memperlihatkan bahwa Gereja dengan kehadirannya saja, beserta semua kurnia yang ada padanya, merupakan sumber yang sangat dibutuhkan dunia zaman sekarang. Tetapi terutama hendaklah mereka memperhatikan pesan konsili ini: Karena sekarang ini umat manusia semakin merupakan kesatuan di bidang kenegaraan, ekonomi dan sosial, politik dan budaya maka perlu pulalah para imam bersatu padu dalam segala usaha dan karya dibawah bimbingan para Uskup dan Imam Agung Tertinggi. Hendaklah mereka menyingkirkan apa saja yang menimbulkan perpecahan, supaya segenap umat manusia dibawa kedalam kesatuan keluarga Allah.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*, Art. 42.

⁵⁸ *Ibid.*, Art. 43.